

## Anggaran Rp 10 M Ditanggung Pemprov

BALAI KOTA - Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dalam waktu dekat konsultasi dengan BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai pembebasan lahan Kolam Retensi senilai Rp 42,7 miliar yang berpotensi kelebihan anggaran Rp 2,7 miliar.

Besaran nilai Rp 42,7 miliar tersebut sudah ada pembagian dengan Pemprov Jateng. Kota Semarang mendapatkan jatah pembayaran senilai Rp 32 miliar, sedangkan kekurangan yang lain Rp 10,784 miliar ditanggung Pemprov.

"Tidak ada yang salah dari LHP BPK. BPK memberi peringatan pada Pemkot supaya pembayarannya tidak melebihi taksiran harga dari tim appraisal. Kami tetap pada Rp 32 miliar, sedangkan yang lain ditanggung Pemprov. Pembukuan-nya juga berbeda," kata Wali Kota Soemarmo HS.

Masalah tersebut sudah dibicarakan dengan Sekda Jateng, Hadi Prabowo. Sekarang yang menjadi pekerjaan rumah Pemkot adalah melunasi kekurangan dari Rp 32 miliar yang baru dibayarkan Rp 19 miliar.

(Sambungan hlm A)

"Tidak akan hangus uang itu. Kita akan melunasi, dananya sudah siap," lanjut dia.

### Tidak Hangus

Terpisah, Kepala Dinas PSDA dan ESDM Ir Fauzi MT mengungkapkan, nantinya kepada BPK akan dijelaskan permasalahan tersebut. Koordinasi itu dilakukan bersama instansi keuangan daerah dan Dinas PU yang akan difasilitasi Pemprov Jateng.

Pihaknya akan mengkaji ulang hasil appraisal serta melengkapi kekurangan itu dengan batas maksimal dua bulan.

Fauzi yakin dana Rp 19 miliar yang sudah dibayarkan pada PT Tanah Mas Baruna (TMB) tidak akan hangus. Selain itu, dirinya menampik kalau ada nota kesepakatan antara Pemkot dan PT TMB mengenai batas waktu pembayaran. "Tidak semudah itu (hangus). Uang itu milik rakyat, sehingga fungsinya tetap terbayarkan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, BPK Perwakilan Jateng menemukan ada rekening tidak wajar dalam pembebasan lahan Kolam Retensi. Biaya pembebasannya berpotensi kelebihan Rp 2,7 miliar.

Pasalnya tim appraisal menentukan harga lahan di kawasan PT Pelindo itu Rp 39 miliar. Namun Pemkot melaporkannya Rp 42,7 miliar.

Menanggapi soal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Ahmadi meminta Pemkot supaya serius untuk menyelesaikannya. Sudah seharusnya Pemkot segera melunasi kekurangannya. Dengan Demikian, sebagai Ketua Pansus LKPj APBD 2009, pihaknya akan memanggil kembali pemkot. (H37,H21-16)